

TEKNOLOGI DAN PERKEMBANGAN AGRIBISNIS CABAI DI KABUPATEN BOALEMO PROVINSI GORONTALO

*Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Negeri Gorontalo, Jalan Jenderal Sudirman No. 6, Kota Gorontalo 96122
Telp. (0435) 821125, Faks. (0435) 821752, E-mail: ung@ung.ac.id*

Diajukan: 9 November 2009; Diterima: 3 Januari 2011

ABSTRAK

Cabai merupakan komoditas unggulan Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo yang dicanangkan pemerintah daerah melalui program Gemar Malita. Pembangunan agribisnis cabai di kabupaten ini masih pada tahap subsistem *on farm*, tetapi pengembangannya mempunyai keunggulan komparatif dan kompetitif. Secara finansial, pengembangan cabai lebih menguntungkan dan mempunyai daya saing yang lebih tinggi dibanding jagung dan padi dengan nilai R/C dan B/C cabai masing-masing 2,15 dan 1,87, lebih tinggi daripada dua komoditas unggulan tersebut. Selain itu, cabai merupakan komoditas basis di Kecamatan Tilamuta, Botumoito, Wonosari, dan Paguyaman Pantai. Cabai umumnya dibudidayakan pada tanah Inceptisol, Alfisol, Mollisol, dan Entisol. Namun, lahan ini umumnya telah digunakan untuk komoditas lain atau dikonversi ke penggunaan nonpertanian. Iklim yang kering dan kesuburan tanah yang rendah sampai sedang merupakan faktor pembatas dalam pengembangan cabai di daerah ini. Upaya dan strategi yang dapat ditempuh meliputi konservasi tanah dan air, intensifikasi dan diversifikasi tanaman, pembinaan kearifan lokal, penyuluhan dan pemberian insentif, serta pemberdayaan kelembagaan perdesaan dan penyuluhan. Hal penting lain yang perlu dilakukan adalah mengembangkan kemitraan dengan pihak swasta melalui pola inti-plasma, *contract farming*, subkontrak, dagang umum, keagenan, dan kerja sama operasional agribisnis.

Kata kunci: Cabai, teknologi, agribisnis, Gorontalo

ABSTRACT

Technology and agribusiness development of chili in Boalemo Regency of Gorontalo Province

Chili is a leading commodity in Boalemo Regency, Gorontalo Province endorsed by local government through Gemar Malita program. Chili agribusiness development in this region is still at the farm subsystem stage, but its development has comparative and competitive advantages. Financially, chili development was more profitable and had higher competitiveness than maize and rice with the values of R/C and B/C of chili were 2.15 and 1.87, respectively, higher than those of both commodities. In addition, chili is a main commodity in Tilamuta, Botumoito, Wonosari, and Paguyaman Pantai subdistricts. Chili was commonly cultivated in Inceptisols, Alfisols, Mollisols, and Entisols. However, this land had generally been used for other commodities or converted to nonagricultural use. Dry climate and low to medium soil fertility are limiting factors for chili development in this area. Efforts and strategies that can be taken consist of application of soil and water conservation, crop intensification and diversification, development of local wisdom, agricultural extension service, provision of incentive, and empower rural and agricultural extension institutions. Another important aspect is the development of partnerships with private parties through nucleus plasma partnership, contract farming, sub-contract, general trading, agency, and agribusiness operational cooperation.

Keywords: Chili, technology, agribusiness, Gorontalo

Pembangunan pertanian berkelanjutan memiliki tiga tujuan, yaitu tujuan ekonomi dalam rangka efisiensi dan pertumbuhan ekonomi, tujuan sosial yang berkaitan dengan kepemilikan yang berkeadilan, dan tujuan ekologi untuk kelestarian sumber daya alam dan ling-

kungan (Sanim 2006). Hal ini sejalan dengan pernyataan Saragih (1997), Jayadinata (1999), dan Nasoetion (1999) bahwa pembangunan pertanian di suatu wilayah akan berjalan efektif jika dikaitkan dengan tujuan sosial, ekonomi, ekologi maupun sumber daya lainnya.

Hortikultura merupakan salah satu subsektor pertanian yang berperan penting dalam mendukung perekonomian nasional, khususnya dalam meningkatkan pendapatan masyarakat. Kontribusi subsektor hortikultura terhadap produk domestik bruto nasional (berdasarkan harga

berlaku) pada tahun 2005 mencapai Rp61.792,44 triliun, dan meningkat menjadi Rp68.640,39 triliun pada 2006, Rp74.768 triliun pada 2007 (*prognosa*), dan target menjadi Rp78.292 triliun pada 2008 (Direktorat Jenderal Hortikultura 2008). Indonesia dengan potensi sumber daya lahan dan agroklimat yang beragam berpeluang untuk mengembangkan berbagai tanaman hortikultura tropis, yang mencakup 323 jenis komoditas.

Untuk meningkatkan dan mempertahankan produksi hortikultura, pada 2003 pemerintah mencanangkan program Gerakan Mandiri Hortikultura Tropika (Gema Hortika 2003). Sasaran utama program ini adalah tercapainya tingkat konsumsi buah dan sayuran masyarakat Indonesia masing-masing 65/kg/kapita/tahun dan nilai ekspor US\$ 600 juta pada tahun 2003 (Rukmana 2006). Berkaitan dengan itu, berbagai kendala dan masalah yang terkait dengan upaya meningkatkan produksi, mutu, dan daya saing produk hortikultura perlu disikapi dengan pendekatan pengembangan hortikultura secara terpadu yang dikenal dengan enam pilar pengembangan hortikultura (Direktorat Jenderal Hortikultura 2008). Enam pilar kegiatan pengembangan hortikultura yaitu: 1) pengembangan kawasan agribisnis hortikultura, 2) penataan manajemen rantai pasokan (*supply chain management*), 3) penerapan budi daya pertanian yang baik (*good agricultural practices/GAP*) dan prosedur operasi standar (POS), 4) fasilitasi terpadu investasi hortikultura, 5) pengembangan kelembagaan usaha, dan 6) peningkatan konsumsi dan akselerasi ekspor. Kegiatan dilaksanakan secara simultan dan terintegrasi antara pusat dan daerah untuk memfasilitasi dan mempermudah akses swasta dalam mengembangkan hortikultura.

Salah satu komoditas hortikultura penting adalah cabai. Masyarakat memanfaatkan cabai sebagai rempah dan bumbu masakan, kesehatan, dan bahan baku industri (Tanindo Agribusiness Company 2009). Produksi cabai nasional tahun 2009 mencapai 1,75 juta ton dengan hasil rata-rata 6,50 t/ha. Secara kumulatif, produksi cabai telah melebihi kebutuhan konsumsi nasional, yaitu 1,20 juta ton (Fauziah 2010). Namun, data Deptan (2009) menunjukkan bahwa sampai tahun 2008 produksi cabai nasional baru mencapai 423,14 ton dengan hasil rata-rata 4,28 t/

ha. Kondisi ini menyebabkan volume ekspor sampai tahun 2008 baru mencapai 6.402,70 ton, sedangkan volume impor lebih tinggi, yakni 16.111,05 ton. Dengan demikian, peluang pengembangan cabai secara nasional terbuka luas.

Kebutuhan cabai terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir seiring dengan bertambahnya kebutuhan masyarakat dan permintaan industri. Bahkan, pada waktu tertentu, terutama menjelang hari raya dan hari besar keagamaan, kebutuhan cabai meningkat melampaui ketersediaannya di pasaran. Akibatnya, harga cabai melambung tinggi. Kompas, Senin 28 Juli 2010 melaporkan harga cabai saat itu mencapai Rp40.000/kg. Oleh karena itu, pengembangan cabai mempunyai prospek yang baik dengan menerapkan sistem agribisnis yang tepat (Saragih 1998; Asriani 2003).

Agribisnis merupakan cara melihat pertanian sebagai suatu sistem bisnis, yang terdiri atas beberapa subsistem yang terkait satu sama lain (Satyarini 2009). Saragih (2002) membagi konsep pembangunan agribisnis menjadi empat subsektor, yaitu subsektor hulu (*up stream agribusiness*), subsektor usaha tani (*on-farm agribusiness*), subsektor hilir (*down stream agribusiness*), dan subsektor jasa penunjang (*supporting system agribusiness*). Satyarini (2009) menegaskan bahwa azas dalam pengembangan agribisnis antara lain adalah terpusat (*centralized*), efisien (*efficient*), menyeluruh dan terpadu (*holistic and integrated*), dan kelestarian lingkungan (*environmental sustainability*).

Potensi pengembangan agribisnis cabai terbuka luas di luar Jawa, terutama di Provinsi Gorontalo. Sejak ditetapkan sebagai komoditas unggulan kedua di provinsi ini, luas panen cabai sampai 2008 mencapai 1.693 ha dengan produksi 10.891,70 ton (BPS Provinsi Gorontalo 2009). Produksi yang tinggi sering menyebabkan turunnya harga cabai di pasar hingga Rp5.000/kg, padahal menjelang hari raya keagamaan, harga cabai melonjak mencapai Rp50.000/kg (Imran 2008).

Dari aspek budi daya, usaha tani cabai di Gorontalo menghadapi berbagai permasalahan, seperti kekeringan, kurangnya ketersediaan benih unggul, terbatasnya tenaga kerja, rendahnya diseminasi teknologi, tingginya biaya transportasi, minimnya infrastruktur, dan rendahnya jaminan harga. Hal ini menyebabkan laju peningkatan produksi cabai cenderung

fluktuatif. Imran (2008) melaporkan masih banyak petani cabai di Gorontalo yang menggunakan faktor-faktor produksi secara tidak efisien, seperti bibit, pupuk SP36 dan KCl, dan fungisida. Di samping itu, pengembangan cabai di daerah ini masih pada taraf produksi massal dan wilayah pengembangannya tersebar secara tidak merata. Di beberapa tempat, cabai dikembangkan pada lahan dengan kemiringan lebih dari 15%. Kondisi agroklimat daerah Gorontalo yang termasuk zona E (Oldeman dan Darmiyati 1977) menyebabkan pada bulan-bulan tertentu tanaman cabai mengalami defisit air sehingga peluang gagal panen sangat tinggi (Nurdin *et al.* 2009).

Kabupaten Boalemo merupakan salah satu sentra pengembangan cabai di Provinsi Gorontalo. Kontribusi produksi sampai 2008 mencapai 17,67% terhadap produksi cabai provinsi (BPS Provinsi Gorontalo 2009). Kontribusi tersebut menempatkan Boalemo sebagai penghasil cabai ketiga terbanyak setelah Bone Bolango dan Gorontalo. Masyarakat Provinsi Gorontalo, terutama di Kabupaten Boalemo, sangat lekat dengan cabai sebagai bumbu masakan, selain menjadi pendamping utama makanan pokok.

Mario (2009) melaporkan cabai varietas lokal Gorontalo (Malita FM) mengandung kalori 75,54 kkal, protein 6,16%, lemak 2,06%, karbohidrat 8,09%, kalsium 0,04%, fosfor 1,96 ppm, besi 0,006%, vitamin C 67,92 mg/100 g, dan air 78,58% (Gambar 1). Cabai juga mengandung minyak atsiri kapsikol yang dapat menggantikan fungsi minyak kayu putih (Setiadi 2001).

Makalah ini mengulas teknologi dan perkembangan agribisnis cabai di Kabupaten Boalemo berdasarkan status agribisnis, keunggulan komoditas, potensi, masalah, dan prospek pengembangannya. Diulas pula perbandingan hasil analisis usaha tani cabai dengan komoditas unggulan lain untuk mengetahui keunggulan pengembangan cabai.

PERKEMBANGAN AGRIBISNIS DI KABUPATEN BOALEMO

Berdasarkan pola dasar pembangunan Kabupaten Boalemo tahun 2001–2005, pengembangan pertanian diarahkan pada kawasan Paguyaman sebagai pusat



Gambar 1. Cabai rawit varietas Malita FM yang dikembangkan di Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo.

pengembangan agribisnis, yang merupakan wilayah strategis bagi pengembangan produksi, pengolahan, dan pemasaran komoditas pertanian unggulan. Berkaitan dengan hal tersebut, salah satu prioritas pembangunan Kabupaten Boalemo tahun 2001–2005 adalah program unggulan pertanian dengan sasaran meningkatkan ketahanan pangan dan agribisnis untuk kesejahteraan masyarakat miskin. Rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) 2007 menyebutkan bahwa pembangunan pertanian ditempuh dengan program prioritas revitalisasi pertanian (Bappeda Kabupaten Boalemo 2009). Sasaran yang akan dicapai adalah meningkatkan pertumbuhan sektor pertanian yang telah memberikan kontribusi 37,55% dari PDRB Kabupaten Boalemo (BPS Kabupaten Boalemo 2009). Sasaran khususnya adalah meningkatkan produksi hortikultura, mengembangkan lahan terlantar, serta meningkatkan sarana dan prasarana infrastruktur perdesaan untuk mendorong kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa (Bappeda Kabupaten Boalemo 2009).

Program agropolitan yang dicanangkan pemerintah Provinsi Gorontalo disinergikan dengan program pembangunan Kabupaten Boalemo melalui pengembangan cabai selain jagung. Komoditas ini merupakan *entry point* program Gemar Malita atau Gerakan Masyarakat Menanam Cabai Hasilnya Menjadi Unggulan Daerah yang dicanangkan pemerintah daerah sejak tahun 2008 (Bappeda Kabupaten Boalemo 2009). Program ini menetapkan beberapa kecamatan sebagai sentra produksi cabai, antara lain Paguyaman Pantai dan Botumoito. Dengan demikian, pengembangan cabai telah memiliki payung hukum yang jelas.

Pencanangan program Gemar Malita sebagai program unggulan daerah ber-

implikasi pada luas penggunaan lahan pertanian untuk pengembangan cabai di Kabupaten Boalemo (Nurdin *et al.* 2009). Hal ini terlihat pada sasaran pengembangan cabai tahun 2007–2011 berdasarkan estimasi dan program perluasan areal tanam dan panen (Tabel 1). Kinerja masing-masing kecamatan dalam menyumbang produksi cabai kabupaten disajikan pada Tabel 2. Tampak bahwa program Gemar Malita meningkatkan produksi maupun luas tanam cabai (BPS Kabupaten Boalemo 2009). Kontribusi terbesar diberikan oleh Kecamatan Paguyaman Pantai, yakni 47,80%, dan terendah Kecamatan Wonosari, yaitu 5,50%.

Pengembangan agribisnis cabai di Boalemo secara umum masih pada taraf produksi massal dan tersebar secara tidak merata di hampir seluruh wilayah. Jika diklasifikasi berdasarkan lingkup pembangunan sistem agribisnis (Saragih 2002), dari subsistem hulu sampai hilir belum ada industri cabai, kecuali pemasaran atau distribusi hasil. Cabai umumnya dijual ke

pedagang pengumpul dan tengkulak. Hal ini sejalan dengan laporan Baruwadi *et al.* (2007) bahwa petani mengembangkan usaha tani cabai untuk memenuhi kebutuhan sendiri dan sebagian dijual ke pasar serta pedagang pengumpul. Peran koperasi pertanian belum efektif.

Pada subsistem *on-farm*, petani mengembangkan usaha tani cabai secara sporadis dan tanpa mempertimbangkan kesesuaian dan konservasi lahan. Cabai dibudidayakan pada lahan miring tanpa tindakan konservasi tanah dan air sehingga mengakibatkan erosi tanah dan kekeringan serta gagal panen (Nurdin *et al.* 2009). Subsistem jasa pendukung kondisinya lebih baik dengan adanya transportasi jalan desa dan jalan protokol, termasuk jalan trans Sulawesi. Adanya SMK pertanian di Kecamatan Paguyaman dan Wonosari dapat menyediakan SDM terampil. Kebijakan pemerintah daerah juga sangat mendukung program pengembangan cabai sebagai komoditas unggulan. Namun, perkreditan (modal usaha

Tabel 1. Sasaran pengembangan komoditas cabai di Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, 2007–2012.

Tahun	Sasaran			
	Luas tanam (ha)	Luas panen (ha)	Produktivitas (t/ha)	Produksi ¹ (t)
2007	355	350	5,5	1.925
2008	375	370	5,6	2.072
2009	495	490	5,7	2.793
2010 ²	520	515	5,8	2.987
2011 ²	650	615	5,9	3.628
2012 ²	684	680	6,0	4.080

¹Sasaran kenaikan produksi cabai 15%/tahun.

²Data estimasi (target capaian).

Sumber: Bappeda Kabupaten Boalemo (2009).

Tabel 2. Luas tanam dan produksi cabai setiap kecamatan di Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, sampai tahun 2007.

Kecamatan	Luas panen (ha)	Produksi (t)	Produktivitas (t/ha)	Kontribusi produksi (%)	
Mananggu	55	318	5,8	16,5	
Tilamuta	41	195	4,8	10,1	
Botumoito	25	125	5,0	6,5	
Dulupi	30	152	5,1	7,9	
Paguyaman	23	110	4,8	5,7	
Paguyaman Pantai	155	920	5,9	47,8	
Wonosari	21	105	5,0	5,5	
Kabupaten	2007	350	1.925	5,5	100
Boalemo	2006	264	725	2,7	
	2005	221	436	2,0	

Sumber: BPS Kabupaten Boalemo (2009).

tani) dan kelembagaan petani relatif minim sehingga perlu dibenahi dan diberdayakan.

KEUNGGULAN KOMODITAS CABAI

Komoditas unggulan merupakan komoditas yang layak diusahakan karena memberikan keuntungan kepada petani, baik secara biofisik, sosial maupun ekonomi. Suatu komoditas layak dikembangkan jika komoditas tersebut diusahakan sesuai dengan zona agroekologinya, mampu memberi peluang berusaha, serta dapat dilakukan dan diterima masyarakat setempat sehingga berdampak pada penyerapan tenaga kerja dan secara ekonomi menguntungkan (Susanto dan Sirappa 2007).

Syafruddin *et al.* (2004) menyatakan, penetapan komoditas unggulan di suatu wilayah diharapkan dapat meningkatkan efisiensi usaha tani dan memacu perdagangan antardaerah dan antarnegara. Selanjutnya Rachman (2003) menyatakan, pada era pasar bebas, hanya komoditas yang diusahakan secara efisien dari sisi teknologi dan sosial ekonomi serta mempunyai keunggulan komparatif dan kompetitif yang mampu bersaing secara berkelanjutan dengan komoditas yang sama dari wilayah lain. Penentuan komoditas unggulan penting karena ketersediaan dan kemampuan sumber daya alam, modal, dan SDM untuk menghasilkan dan memasarkan semua komoditas yang diproduksi

di suatu wilayah secara simultan relatif terbatas (Susanto dan Sirappa 2007).

Penetapan komoditas unggulan pertanian di suatu daerah perlu memerhatikan keunggulan komparatif dan kompetitifnya (Baruwadi *et al.* 2007). Keunggulan komparatif komoditas dari suatu daerah tercipta dari interaksi antara kelimpahan sumber daya (biofisik), penguasaan teknologi, dan kemampuan manajerial dalam kegiatan pengembangan komoditas yang bersangkutan. Keunggulan kompetitif merupakan hasil interaksi antara keunggulan komparatif dan distorsi pasar. Pada kondisi perekonomian yang tidak mengalami distorsi sama sekali, keunggulan kompetitif juga merupakan keunggulan komparatif. Keunggulan komparatif wilayah dapat diketahui berdasarkan analisis finansial dan metode *location quotient* (LQ).

Nurdin *et al.* (2009) menyatakan, usaha tani cabai per tahun di Kabupaten Boalemo layak dan menguntungkan

dengan nilai R/C dan B/C masing-masing 2,15 dan 1,87 (Tabel 3). Menurut Soekartawi (1995), usaha tani suatu komoditas akan menguntungkan jika nilai R/C atau B/C > 1. Selain itu, komoditas cabai mempunyai daya saing yang lebih tinggi (kompetitif) dibanding jagung dan padi dengan nilai R/C dan B/C cabai lebih tinggi dibanding dua komoditas tersebut.

Salah satu pendekatan yang dikembangkan Badan Litbang Pertanian untuk menentukan komoditas unggulan adalah dengan metode LQ. Nilai LQ > 1 artinya sektor basis, yaitu komoditas 'x' di suatu wilayah memiliki keunggulan komparatif (produksi melebihi kebutuhan sehingga dapat dijual ke luar wilayah). Nilai LQ = 1 artinya sektor nonbasis, yaitu komoditas 'x' di suatu wilayah tidak memiliki keunggulan (produksi hanya cukup untuk konsumsi sendiri). Nilai LQ < 1 artinya sektor nonbasis, yaitu komoditas 'x' pada suatu wilayah tidak dapat memenuhi kebutuhan sendiri sehingga perlu pasokan dari luar wilayah. Susanto dan Sirappa (2007) menyatakan, penentuan komoditas unggulan berdasarkan analisis LQ kurang memperhitungkan luas lahan untuk usaha tani suatu komoditas, namun lebih menekankan pada kecenderungan peningkatan luas panen dan produksi dibanding produksi komoditas lainnya.

Baruwadi *et al.* (2007) melaporkan, cabai merupakan komoditas basis di dua kecamatan di Boalemo, yaitu Paguyaman Pantai dan Mananggu (Tabel 4). Selanjutnya Nurdin *et al.* (2009) menyatakan cabai merupakan komoditas basis di Kecamatan Tilamuta, Botumoito, Wonosari, dan Paguyaman Pantai dengan nilai LQ 1,15–1,83 (Tabel 5). Hal ini berarti produksi cabai di empat kecamatan tersebut mengalami surplus 1,15–1,83 kali lebih besar dibanding kebutuhan sendiri. Pengembangan cabai menyebar di semua kecamatan di

Tabel 3. Analisis finansial komoditas cabai di Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo.

Komoditas	Jumlah input (Rp)	Pendapatan (Rp)	R/C	Gross margin (Rp)	B/C (dis.rate 15%)
Padi	10.177.826	20.709.615	2,03	10.531.788	1,77
Jagung	4.792.105	10.105.263	2,11	5.313.157	1,83
Cabai	3.331.666	7.166.666	2,15	3.835.000	1,87

Sumber: Nurdin *et al.* (2009).

Tabel 4. Keunggulan komparatif komoditas unggulan berdasarkan aspek wilayah di Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, 2007.

Komoditas	LQ ¹	SI ²	Kecamatan basis	
			Jumlah	Persentase
Padi	0,39	0,40	3	42,85
Jagung	0,34	0,88	4	57,14
Cabai	0,12	0,29	2	28,57

¹LQ = *location quotient*, ²SI = *specialization index*.

Sumber: Baruwadi *et al.* (2007).

Tabel 5. Keunggulan komparatif komoditas cabai berdasarkan aspek wilayah di Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, 2009.

Kecamatan	LQ ¹	LI ²	SI ³
Manangu	0,73	-0,03	-0,09
Tilamuta	1,83 ⁴	0,14	0,28
Botumoitto	1,59 ⁴	-0,05	0,19
Dulupi	0,38	-0,003	-0,21
Paguyaman	0,89	0,004	-0,04
Paguyaman Pantai	1,15 ²	0,23	0,05
Wonosari	1,39 ²	-0,003	0,13

¹LQ = *location quotient*; ²LI = *location index*; ³SI = *specialization index*; ⁴Kecamatan basis (LQ > 1).

Sumber: Nurdin *et al.* (2009).

Kabupaten Boalemo, hanya sedikit terjadi pemusatan di Kecamatan Paguyaman Pantai dengan nilai 0,23. Hal ini sejalan dengan pendapat Baruwadi *et al.* (2007), bahwa cabai bukan merupakan komoditas yang spesial dan pengembangannya menyebar di seluruh kecamatan.

POTENSI KABUPATEN BOALEMO UNTUK PENGEMBANGAN CABAI

Berdasarkan data BPS Kabupaten Boalemo (2009), luas lahan pertanian di Kabupaten Boalemo mencapai 83.024 ha atau 32,35% dari luas total wilayah kabupaten ini. Dari luas lahan pertanian tersebut, 3.553 ha atau 39,21% merupakan ladang atau huma dan 32.266 ha atau 38,86% berupa tegalan atau kebun. Penggunaan lahan tegalan untuk budi daya cabai meningkat sampai tahun 2007, yaitu 32.260 ha atau 12,78% dari tahun 2006 dan 10,80% dari tahun 2005. Luas ladang sebagai salah satu areal budi daya cabai juga meningkat pada tahun 2007 sebesar 1,82% dari 2006, tetapi menurun 1,39% dibandingkan tahun 2005. Penurunan tersebut karena ladang dikonversi ke

penggunaan pertanian lainnya dan ke nonpertanian, seperti permukiman.

Luas wilayah Kabupaten Boalemo 2.571,36 km² dan luas lahan untuk pengembangan cabai 76.353,32 ha (BPS Kabupaten Boalemo 2009; Bappeda Kabupaten Boalemo 2009; Nurdin *et al.* 2009). Namun, potensi sumber daya lahan tersebut belum dimanfaatkan secara optimal dan sebagian berstatus lahan tidur.

Tanaman cabai memerlukan persyaratan tumbuh dan pengembangan tertentu untuk berproduksi secara optimal sesuai dengan sifat genetik dan lingkungannya (FAO 1967; Djaenuidin *et al.* 2000). Sifat dan karakteristik sumber daya lahan beragam di setiap tempat sesuai dengan kondisi wilayah. Lebih lanjut Djaenuidin *et al.* (2000) menyatakan, komoditas pertanian harus diusahakan sesuai dengan persyaratan tumbuh agar berproduksi optimal dengan kualitas hasil prima dan *input* yang rendah sehingga hasilnya berdaya saing di pasaran.

Tanah-tanah di Kabupaten Boalemo umumnya terbentuk dari bahan aluvium dan vulkan, bersifat andesitik-basaltik pada kondisi iklim kering, dan topografi datar hingga berbukit (BPTP Gorontalo 2002). Sesuai dengan klasifikasi Soil

Survey Staff (2006), tanah di wilayah ini terdiri atas Entisol, Inceptisol, Vertisol, Mollisol, Alfisol, dan Histisol (BPTP Gorontalo 2002; Nurdin *et al.* 2009). Lebih lanjut Nurdin *et al.* (2009) melaporkan cabai dominan dibudidayakan pada tanah Inceptisol, Alfisol, Mollisol, dan Entisol. Vertisol dimanfaatkan untuk padi sawah dan Histisol merupakan hutan bakau (mangrove) di pesisir pantai selatan.

Potensi pengembangan komoditas pertanian, termasuk cabai ditentukan antara lain oleh tingkat kesesuaian lahan (Hikmatullah *et al.* 2008). Menurut hasil analisis potensi sumber daya lahan (BPTP Gorontalo 2002; Nurdin *et al.* 2009), Kabupaten Boalemo dapat dikelompokkan menjadi empat kawasan pengembangan (Tabel 6). Komoditas cabai dapat dikembangkan pada wilayah dengan lereng < 8%, berupa lahan basah dan lahan kering dataran rendah (< 700 m dpl) yang meliputi luas 76.353,32 ha. Wilayah ini sesuai untuk pertanian dengan risiko penghambat ringan atau termasuk kelas sangat sesuai, cukup sesuai, dan sesuai marginal. Sebarannya meliputi *landform* dataran aluvial dan aluvio-koluvial di sekitar wilayah DAS serta di Kecamatan Paguyaman Pantai, Paguyaman, Manangu, Dulupi, Tilamuta, dan Batumoitto.

MASALAH DAN PROSPEK PENGEMBANGAN CABAI

Biofisik Lahan

Topografi permukaan tanah di Kabupaten Boalemo sebagian besar berupa perbukitan, dengan ketinggian tempat bervariasi dari 0 sampai 2.000 m dpl (Tim Fahutan IPB 2008; BPS Kabupaten Boalemo 2009). Ketinggian tempat berkaitan erat dengan fisiografi kawasan. Fisiografi merupakan salah satu faktor pembatas sebagai tolok ukur kelayakan lahan untuk diusahakan sebagai kawasan budi daya. Menurut Nurdin *et al.* (2009), kemiringan lahan di wilayah Kabupaten Boalemo bervariasi dari 0–2% sampai > 40%. Berdasarkan data iklim selama 10 tahun terakhir (1997–2008) dari Dinas PU (2009), wilayah Kabupaten Boalemo memiliki perbedaan musim kemarau dan musim hujan yang jelas. Curah hujan tahunan berkisar antara 1.021–1.253 mm. Menurut Rukmana (2006), curah hujan yang baik untuk pertumbuhan cabai berkisar antara 600–1.250 mm. De-

ngan demikian, curah hujan menjadi salah satu pembatas karena intensitasnya rendah. Menurut Oldeman dan Darmiyati (1977), Boalemo termasuk dalam zona agroklimat E3 dan E4 dengan bulan basah kurang dari 2 bulan dan bulan kering 4–7 bulan. Musim kemarau panjang terjadi pada Juli-November (Nurdin *et al.* 2009).

Bahan induk tanah di daerah ini dapat dibedakan menjadi 1) endapan aluvium yang menutupi dataran banjir sungai, 2) endapan danau yang bersusunan liat berwarna kelabu padat, 3) batuan volkan andesitik-basaltik, dan 4) batuan intrusi yang terdiri atas diorit, granit, dan grano-diorit yang umumnya sudah melapuk. Sering dijumpai sisipan kapur pada bagian celah yang diduga sebagai hasil kontak dengan air laut (Bachri *et al.* 1993; BPTP Gorontalo 2002). Kandungan mineral sukar lapuk lebih dominan daripada mineral mudah lapuk (Nurdin *et al.* 2009). Dominasi mineral fraksi pasir berupa kuarsa dan opak dalam jumlah sedikit serta masih dijumpainya konkresi besi menunjukkan bahwa tingkat kesuburan tanah di daerah ini tergolong rendah sampai sedang sehingga pengembangan komoditas cabai membutuhkan pemupukan.

Ketersediaan dan Persaingan Pemanfaatan Lahan

Menurut Mulyani dan Las (2008), lahan yang dianggap tersedia adalah lahan yang sesuai yang saat ini belum dimanfaatkan

secara optimal untuk pertanian, baik berupa padang alang-alang, semak belukar maupun kawasan hutan (hutan produksi atau hutan konversi). Namun, lahan tersebut belum diketahui status kepemilikannya sehingga dapat berupa tanah milik negara, masyarakat atau lahan hak penguasaan hutan (HPH)/hak guna usaha (HGU) yang diterlantarkan, lahan bekas hutan yang terbakar, atau tanah ulayat. Hal ini sejalan dengan pendapat Jamal *et al.* (2002) bahwa kepemilikan dan penguasaan lahan pertanian di perdesaan bukan masalah baru. Menurut Abdurachman *et al.* (2008), luas penguasaan lahan rata-rata nasional menurun dari 0,86 ha pada tahun 2003 menjadi 0,73 ha per rumah tangga petani (RTP) pada tahun 2007. Sejalan dengan itu, jumlah petani gurem (luas lahan < 0,50 ha) meningkat dari 10,80 juta RTP pada tahun 1993 menjadi 13,70 juta pada tahun 2003, atau rata-rata naik 2,40%/tahun.

Lahan yang potensial untuk pengembangan cabai umumnya terletak pada lereng < 10%. Namun, lahan ini sudah dimanfaatkan untuk tanaman pangan dan perkebunan. Pengembangan cabai saat ini dilakukan pada lahan dengan kemiringan >10%, bahkan kebanyakan pada lahan miring (> 25%). Husain *et al.* (2005) melaporkan, erosi tanah dari lahan pertanian di sub-DAS Dulupi Kabupaten Boalemo mencapai 1,081 t/ha/tahun. Hal ini karena budi daya cabai belum menerapkan teknik konservasi tanah sehingga menimbulkan erosi.

Program agropolitan jagung juga menjadi pesaing dalam penggunaan lahan yang sesuai untuk cabai. Luas lahan untuk pengembangan jagung sampai tahun 2008 mencapai 30.794 ha, sedangkan luas pengembangan cabai pada tahun yang sama baru 355 ha (BPS Kabupaten Boalemo 2009). Di samping itu, pengembangan cabai sebelum pencanangan program Gemar Malita hanya pada areal sempit dan skala rumah tangga (subsisten) atau sebagai dapur hidup. Akibatnya, luas pengembangan cabai berkorelasi dengan luas kepemilikan lahan pertanian dan lahan pekarangan.

Prospek Pengembangan Agribisnis Cabai

Berdasarkan aspek sumber daya lahan, lahan yang tersedia secara aktual untuk pengembangan cabai mencakup 76.353,32 ha atau 36,74% dari luas total (Nurdin *et al.* 2009). Jika menggunakan asumsi yang dikemukakan Mulyani dan Las (2008) serta data BPS (2008), luas lahan tersedia secara potensial mencapai 92.470 ha atau 44,50% dari luas total wilayah. Dengan demikian, masih tersedia lahan yang luas untuk pengembangan cabai.

Guna memenuhi kebutuhan cabai yang terus meningkat sekaligus memberikan *multiplier effect* terhadap pembangunan wilayah, diperlukan strategi untuk meningkatkan produksi tanpa mengabaikan kelestarian lingkungan.

Tabel 6. Potensi pengembangan komoditas pertanian di Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo.

Sistem pertanian	Alternatif komoditas	Luas	
		ha	%
Pertanian lahan basah, tanaman pangan, hortikultura, perkebunan	Padi, jagung, ubi kayu, cabai, tomat, pisang, kelapa, kakao	20.975,0	10,09
Pertanian lahan kering, tanaman pangan, hortikultura, perkebunan	Jagung, kacang tanah, kedelai, ubi kayu, cabai, tomat, bawang merah	16.457,4	7,92
Pertanian lahan kering, tanaman perkebunan, tanaman pangan	Pisang, kelapa, jambu mete, mangga, rambutan, tebu, jagung, kapas	26.726,8	12,86
	Durian, rambutan, jagung, ubi kayu, jati, jambu mete	16.410,4	7,90
Pertanian lahan kering, tanaman perkebunan	Jambu mete, jati, durian, rambutan,	17.338,1	8,34
	Jati, jambu mete	73.249,1	35,25
Hutan		34.600,9	16,65
Penggunaan lainnya (nonpertanian)		2.060,6	0,99
Jumlah		207.818,30	100

Sumber: BPTP Gorontalo (2002); Nurdin *et al.* (2009).

Strategi yang dapat ditempuh meliputi aspek teknis, sosial budaya, dan kelembagaan.

Aspek Teknis

Konservasi tanah dan air

Sistem pertanian berkelanjutan mensyaratkan penerapan konservasi tanah dan air (Arsyad 2006). Dalam menerapkan konservasi tanah dan air, Douglas (1992) mengajukan dua pendekatan, yaitu perencanaan konservasi tanah harus mengutamakan petani (*farmer first approach*) dan penerapan konservasi tanah harus ramah dengan petani (*farmer friendly*). Menurut Arsyad (2006), tantangan penerapan kedua pendekatan tersebut adalah mempertemukan perspektif yang berbeda antara petani dan perencana konservasi tentang kegawatan dan sifat masalah yang dihadapi serta cara yang tepat mengatasinya. Lebih lanjut dinyatakan bahwa dalam menaksir kesesuaian rekomendasi di tingkat lapangan, ada delapan butir pertimbangan, yaitu: 1) secara teknis mungkin dilakukan, 2) secara praktis layak, 3) secara finansial diinginkan bersama, 4) bersifat stabil, 5) berkelanjutan, 6) berlaku umum, 7) ekonomis, dan 8) secara sosial diterima masyarakat.

Pendekatan teknis dapat dilakukan melalui pengolahan tanah minimal, biasanya hanya di sekitar lubang tanam atau jalur tanaman dengan frekuensi pengolahan tanah minimal. Hal ini dilakukan karena pengolahan tanah intensif dapat merusak struktur tanah serta menurunkan kapasitas infiltrasi tanah dan daya hantar air (Husain *et al.* 2002; Pomalingo dan Husain 2003), serta kualitas kimia dan biologis tanah (Lorenz *et al.* 2000). Hasil penelitian Rachman *et al.* (2004) menunjukkan, pengolahan tanah yang berlebihan dapat menyebabkan kekahatan bahan organik tanah. Menurut Husain *et al.* (2002), pengolahan tanah minimal menambah jumlah pori makro sehingga meningkatkan infiltrasi dan menekan aliran permukaan serta erosi tanah.

Pada lahan dengan lereng 0–8%, konservasi tanah secara vegetatif dapat dikombinasikan dengan metode mekanik, yaitu pengolahan tanah menurut kontur + pembuatan guludan + *strip cropping*. Sementara itu, pada lahan dengan lereng < 5% dapat diterapkan teras gulud +

pengolahan tanah menurut kontur + mulsa (Arsyad 2006). Noorhadi dan Sudadi (2003) melaporkan, pemberian mulsa memberikan pengaruh nyata terhadap iklim mikro dan hasil cabai yang lebih baik pada tanah Entisol. Suripin (2000) mengemukakan bahwa metode vegetatif adalah penggunaan tumbuhan dan sisasisinya sebagai sarana konservasi tanah untuk mengurangi daya rusak hujan, aliran air permukaan tanah, dan erosi. Pada lahan dengan lereng 8–15%, metode mekanik dapat dikombinasikan dengan metode vegetatif karena efektif mengendalikan erosi, yaitu teras gulud/teras kredit + pengolahan tanah menurut kontur + mulsa atau teras bangku + mulsa + tanaman penutup tanah berkerapatan tinggi (Dariah *et al.* 2004; Santoso *et al.* 2004; Joseph (2005). Teknik konservasi ini juga cepat diadopsi petani (Abdurachman *et al.* 2008). Rachman (1993) menyatakan proses pembentukan teras pada sistem pertanian lorong terjadi secara bertahap dan mulai efektif setelah tiga tahun.

Intensifikasi dan diversifikasi tanaman

Intensifikasi dapat dilakukan pada tanaman cabai yang telah ada (Mulyani dan Las 2008) dan dapat dikembangkan pada kecamatan yang merupakan basis cabai (Nurdin *et al.* 2009). Kesenjangan produksi cabai antarkabupaten di Provinsi Gorontalo mengindikasikan program intensifikasi dengan menerapkan inovasi teknologi yang tepat dapat dilakukan untuk meningkatkan produktivitas. Paket teknologi yang telah ada perlu diseleksi agar lebih tepat guna, sesuai dengan kondisi lahan (tanah, air, dan iklim) dan petani (Abdurachman *et al.* 2008).

Produksi cabai dapat dipacu melalui pembangunan irigasi suplemen, terutama pada lahan kering agar lahan dapat diusahakan sepanjang tahun. Menurut Mulyani dan Las (2008), irigasi pada lahan kering belum mendapat perhatian pemerintah dibandingkan dengan lahan sawah. Penerapan inovasi teknologi seperti varietas unggul, pemupukan berimbang, dan pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT) dapat meningkatkan produksi cabai di lahan kering.

BPTP Gorontalo (2002) telah membuat rekomendasi pengelolaan tanaman cabai umur 6 bulan berdasarkan kebutuhan hara

tanaman dan kandungan hara tanah, yaitu kebutuhan bibit 20.000–27.000 batang/ha untuk jarak tanam 40 cm x 50 cm, pupuk organik 7,50–15 t/ha, urea 225–370 kg/ha, SP36 70–140 kg/ha, dan KCl 82–165 kg/ha. Dengan menerapkan rekomendasi tersebut, hasil cabai mencapai 8–15 t/ha. Cabai sebaiknya ditanam saat hujan mulai berkurang. Dosis pemupukan tersebut sebatas pertimbangan kebutuhan tanaman yang dikaitkan dengan ketersediaan hara dalam tanah (Nurdin *et al.* 2009). Untuk memantapkannya, rekomendasi pemupukan perlu diikuti dengan uji tanah dan percobaan lapangan sebagai dasar dalam menyusun rekomendasi pemupukan.

Beberapa keuntungan pengembangan cabai secara intensif (Zulkifli *et al.* 2008) yaitu: 1) meningkatkan produksi untuk memenuhi permintaan skala nasional maupun ekspor, 2) mengintensifkan pemanfaatan sumber daya lahan, baik pekarangan, lahan kering maupun lahan sawah, 3) mengoptimalkan pemanfaatan tenaga kerja dan bahan baku seperti pupuk kandang dan jerami padi, 4) meningkatkan konsumsi cabai sebagai sumber gizi, 5) memperbaiki pendapatan dan kesejahteraan petani serta keluarganya, dan 6) memperbaiki kesuburan tanah bila cabai dirotasi dengan tanaman lain. Pengembangan cabai saat ini masih dilakukan pada areal yang sempit atau sebagai dapur hidup. Oleh karena itu, perlu dilakukan intensifikasi secara bertahap melalui penerapan inovasi teknologi spesifik lokasi dan ramah lingkungan.

Diversifikasi merupakan upaya menganekaragamkan pemanfaatan lahan, baik dengan tumpang sari, tanaman sela maupun rotasi (Mulyani dan Las 2008). Selama ini petani menanam cabai secara monokultur pada lahan terbuka. Adiyoga *et al.* (2004) menunjukkan bahwa nisbah kesetaraan lahan untuk kombinasi tanaman cabai dan petsai di Pangalengan, Jawa Barat adalah 1,47, yang berarti total produktivitas dari sistem ganda ini 47% lebih tinggi dibandingkan dengan sistem tunggal. Dengan kata lain, untuk memperoleh hasil cabai dan petsai, pengusahaannya pada sistem tunggal/monokultur harus 47% lebih luas. Dengan demikian, cabai berpotensi ditumpangsarikan dengan petsai dataran rendah dan tomat. Kabupaten Boalemo merupakan salah satu sentra tomat dataran rendah (BPS Kabupaten Boalemo 2009).

Pengusahaan cabai sebagai tanaman sela di antara tanaman kelapa dan pisang juga berpeluang dikembangkan. Selama ini, hampir seluruh lahan perkebunan kelapa di Gorontalo dimanfaatkan untuk menanam jagung. Hal ini memacu masyarakat di provinsi lain untuk menerapkan teknik budi daya tersebut (Mulyani dan Las 2008). Di beberapa lokasi cabai dibudidayakan pada lahan terbuka dengan kemiringan > 25% sehingga dianjurkan untuk menerapkan konservasi tanah dan air (Joseph 2005; Arsyad 2006). Pemupukan tanaman sela akan menguntungkan tanaman pokok karena sebagian pupuk mengalir ke tanaman pokok (Mulyani dan Las 2008).

Jarak pagar (*Jathropa curcas*) yang umumnya dibudidayakan secara monokultur dapat ditanam secara tumpang sari dengan cabai dan tomat. Pola tumpang sari memerlukan pengaturan jarak tanam sehingga tanaman tidak saling menaungi. Pergiliran tanaman (rotasi) jagung dan cabai, kacang tanah dan cabai juga dapat diterapkan sebagai salah satu upaya mengendalikan hama penyakit tanaman jagung.

Aspek Sosial dan Budaya

Budaya *huyula* atau gotong royong merupakan salah satu bentuk kearifan lokal yang saat ini masih ada, walaupun mulai terkikis oleh perkembangan zaman (Niode 2007). Salah satu kearifan lokal yang masih dipertahankan masyarakat setempat yang berkaitan dengan pertanian, terutama budi daya cabai, yaitu penentuan waktu tanam berdasarkan ilmu perbintangan, yang dikenal dengan *panggoba*. Pada prinsipnya, budaya *panggoba* dipegang oleh seseorang yang dianggap cakap dalam melihat perbintangan lalu mencocokkan tanaman yang sesuai dengan waktu tanam yang tepat. Pranadji (2008) melaporkan, kegiatan pertanian di Gorontalo merupakan bagian budaya masyarakat setempat yang digerakkan oleh nilai-nilai budaya dan bersumber dari kearifan lokal (*local wisdom*).

Penyuluhan agribisnis cabai mulai dari tahap prapanen sampai pascapanen perlu diperbaiki serta disesuaikan dengan kehidupan petani (Simatupang *et al.* 2003). Penyuluh pertanian harus mampu memfasilitasi petani untuk mengembangkan kemitraan usaha agribisnis (Saptana dan

Ashari 2007; Rangkuti 2009). Untuk meningkatkan keefektifan dan efisiensi kegiatan penyuluhan perlu disusun rencana kegiatan yang meliputi pembentukan kader petani pelestari sumber daya lahan, pembentukan kelompok tani, kursus petani, kunjungan, dan perlombaan (Nuryanto *et al.* 2003). Mengingat petani di daerah ini umumnya tergolong miskin sumber daya maka penyediaan sarana produksi dan permodalan mutlak diperlukan (Sajogyo 2002; Simatupang *et al.* 2003; Sudaryanto dan Rusastra 2006). Petani perlu dibantu untuk memperoleh sarana produksi yang diperlukan, termasuk modal usaha dan kemudahan lain.

Pemberian insentif kepada petani juga dapat mendorong mereka mau dan mampu mengoptimalkan sumber daya lahan untuk budi daya cabai. Insentif dapat berupa hibah, subsidi, pinjaman lunak, serta bantuan pangan, sarana pertanian, dan bibit (Nuryanto *et al.* 2003). Hal ini sejalan dengan pernyataan Osemebo (1987) bahwa petani di DAS Way Wesay Lampung dapat melaksanakan program pengembangan pertanian yang produktif, ekonomis, dan ramah lingkungan dengan sistem kontrak konservasi tanah dan air (insentif). Petani yang berhasil akan mendapat imbalan jasa berupa uang tunai sesuai dengan tingkat keberhasilannya. Hal ini menguntungkan petani karena selain memperoleh hasil dari kegiatan pertanian, lingkungan juga relatif terjaga dari degradasi. Pemberian subsidi pajak (Nuryanto *et al.* 2003) dan skema imbalan jasa kepada petani cabai yang melestarikan lingkungan pertanamannya melalui kontrak konservasi (Asha *et al.* 2006) juga penting agar menjadi contoh bagi petani lainnya.

Aspek Kelembagaan

Kelembagaan masyarakat dan ekonomi perlu diberdayakan dalam upaya pembinaan petani. Menurut Rangkuti (2009), kelembagaan merupakan salah satu sumber daya pertanian yang dapat dikembangkan sebagai kegiatan agribisnis untuk meningkatkan keberdayaan, kemandirian, dan kesejahteraan petani. Nuryanto *et al.* (2003) menyatakan bahwa badan perwakilan desa (BPD) dan kelompok tani berperan antara lain dalam menggerakkan masyarakat dalam kegiatan bersama, menumbuhkan dan meningkatkan peran serta masyarakat

dalam kegiatan yang diprakarsai pemerintah daerah, serta meningkatkan kemandirian petani dalam pembangunan pertanian di perdesaan. Koperasi unit desa (KUD) berperan membantu petani anggotanya dalam memperoleh kredit, sarana produksi, dan alat mesin pertanian, serta menampung dan memasarkan hasil.

Rangkuti (2009) menyatakan bahwa KUD perlu ditata ulang dengan pendekatan agribisnis dan sistem ekonomi kerakyatan (kekeluargaan) sesuai dengan kepentingan usaha ekonomi petani. Selain itu, kelembagaan penyuluhan pertanian dan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) dapat menjadi pusat pelayanan dan konsultasi agribisnis (PPKA) di setiap kecamatan melalui sistem penyuluhan partisipatif (Saptana dan Ashari 2007). Pemberdayaan lembaga penyuluhan pertanian dan BPP perlu dilakukan karena lembaga tersebut berhadapan langsung dengan petani.

Kemitraan usaha agribisnis adalah hubungan bisnis usaha pertanian yang melibatkan satu atau sekelompok orang atau badan hukum dengan satu atau kelompok orang atau badan hukum di mana masing-masing pihak memperoleh penghasilan dari usaha bisnis yang sama atau saling berkaitan dengan tujuan menjamin terciptanya keseimbangan, keselarasan, dan keterpaduan yang dilandasi rasa saling menguntungkan, memerlukan, dan saling melaksanakan etika bisnis (Suwandi 1995). Tujuan kemitraan usaha agribisnis cabai antara perusahaan mitra dan petani mitra adalah meningkatkan efisiensi dan produktivitas di segala lini subsistem agribisnis dan menciptakan nilai tambah ekonomi yang merupakan kunci peningkatan daya saing (Saptana *et al.* 2005).

Pengembangan kemitraan usaha agribisnis akan berhasil jika dilakukan secara partisipatif, yaitu melibatkan seluruh pelaku agribisnis dalam proses perencanaan, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi (Syahyuti 2006). Dengan cara ini diharapkan dapat tercapai stabilitas dan kontinuitas produksi, pendapatan, dan kesinambungan usaha (Saptana dan Ashari 2007). Pengembangan kemitraan agribisnis cabai dengan pihak swasta perlu dilakukan dengan perusahaan yang berkaitan langsung dengan komoditas cabai sebagai bahan baku industri. Pola kemitraan yang dapat dilakukan, seperti tertuang dalam SK Mentan No. 940/Kpts/OT.210/10/1997

tentang Pedoman Kemitraan Usaha Pertanian, yaitu: 1) pola inti-plasma, 2) pola kemitraan *contract farming*, 3) pola kemitraan subkontrak, 4) pola dagang umum, 5) pola kemitraan keagenan, dan 6) kerja sama operasional agribisnis (KOA). Uraian model kemitraan masing-masing pola (Saptana *et al.* 2005) adalah sebagai berikut:

Pola kemitraan inti-plasma, yaitu pengusaha besar industri pengolahan hasil dan pedagang besar cabai bertindak sebagai perusahaan mitra/inti yang melakukan kemitraan dengan petani produsen atau kelompok usaha agribisnis sebagai plasma dengan membentuk kesepakatan harga dan kualitas pembelian produk. Kemitraan dilakukan perusahaan mitra/inti dengan kelompok tani agar kegiatan produksi dapat dilakukan secara lebih terkoordinasi dalam satu hamparan dengan skala usaha tertentu. Perusahaan mitra/inti berkewajiban antara lain: 1) menyediakan dan menyiapkan lahan, 2) menyediakan sarana produksi (benih unggul, pupuk, obat-obatan, dan mulsa), 3) memberi bimbingan teknis budi daya dan pascapanen, 4) membiayai pengolahan tanah, pemanenan, dan lainnya, dan 5) memberi bantuan lain untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas usaha. Petani plasma melakukan budi daya sesuai anjuran serta menyerahkan hasil kepada perusahaan mitra/inti sesuai kesepakatan.

Pola kemitraan contract farming, yaitu suatu cara mengatur produksi di mana petani-petani kecil diberi kontrak untuk menyediakan produk pertanian kepada usaha sentral sesuai dengan syarat yang telah ditentukan dalam sebuah perjanjian (kontrak). Badan sentral yang membeli hasil dapat menyediakan bimbingan teknis, manajerial, kredit sarana produksi, serta menampung hasil dan melakukan pengolahan dan pemasaran (Kirk 1987 dalam White 1990). *Contract farming* tampaknya menjadi alternatif

yang menarik bagi perusahaan pengolahan.

Pola kemitraan subkontrak, merupakan model kemitraan yang menyerupai *contract farming*, tetapi pada pola ini kelompok usaha kecil tidak melakukan kontrak secara langsung dengan perusahaan pengolah, melainkan melalui agen atau pedagang. Model ini dapat diterapkan pada pengadaan cabai antara petani dan industri pengolah atau pasar swalayan yang dimediasi pedagang.

Pola kemitraan dagang umum, yaitu usaha menengah dan usaha besar memasarkan produksi usaha kecil, atau usaha kecil memasok kebutuhan yang diperlukan usaha menengah dan usaha besar, atau usaha kecil yang memasarkan hasil usaha menengah dan usaha besar. Model ini dapat diterapkan pada kemitraan petani cabai dan pedagang pengumpul, pedagang besar, dan pasar swalayan.

Pola kemitraan keagenan, yaitu kelompok mitra (usaha kecil) diberi hak untuk memasarkan barang dan jasa usaha perusahaan mitra (usaha menengah dan besar). Keunggulan pola kemitraan ini adalah kelompok mitra memperoleh keuntungan hasil penjualan ditambah komisi (*fee*) dari perusahaan mitra. Model ini dijumpai pada distribusi sarana produksi, seperti benih cabai merah hibrida, pupuk, dan obat-obatan. Pada pola kemitraan ini, biasanya pedagang sarana produksi bertindak sebagai distributor dan penyalur sarana produksi dari perusahaan atau merek tertentu.

Pola kemitraan kerja sama operasional agribisnis, yaitu kelompok mitra menyediakan lahan, sarana, dan tenaga kerja, sedangkan perusahaan mitra menyediakan modal dan atau sarana untuk mengusahakan suatu komoditas pertanian. Perusahaan mitra dapat berbentuk perusahaan inti atau pembina yang melaksanakan pembukaan lahan dan mempunyai usaha budi daya dan unit pengolahan yang dikelola sendiri. Perusahaan inti

membina kelompok mitra dalam bidang teknologi produksi, menyediakan sarana produksi, permodalan, dan pengolahan hasil, menampung produksi, dan memasarkan hasil kelompok mitra.

KESIMPULAN

Cabai merupakan komoditas unggulan Kabupaten Boalemo, selain jagung. Sistem agribisnis cabai di kabupaten ini, mulai subsistem hulu sampai hilir belum terdapat industri. Cabai umumnya dijual ke pedagang pengumpul dan tengkulak.

Pengembangan cabai di Kabupaten Boalemo mempunyai keunggulan komparatif dan kompetitif. Secara finansial, pengembangan cabai menguntungkan dengan nilai R/C dan B/C >1. Cabai umumnya dibudidayakan pada tanah Inceptisol, Alfisol, Mollisol, dan Entisol, pada lahan dengan lereng < 8%, baik berupa lahan basah maupun lahan kering dataran rendah (< 700 m dpl). Iklim kering dan kesuburan tanah yang rendah sampai sedang merupakan faktor pembatas pengembangan cabai di Kabupaten Boalemo.

Strategi pengembangan cabai sekaligus untuk menyukseskan program Gemar Malita di Kabupaten Boalemo meliputi penerapan konservasi tanah dan air pada lahan dengan lereng >15%, intensifikasi dan diversifikasi tanaman cabai dengan tanaman produktif lain pada lahan yang sesuai, pemberdayaan kearifan lokal yang berkaitan dengan kegiatan pertanian, penyuluhan dan pemberian insentif kepada petani cabai, serta pemberdayaan kelembagaan perdesaan yang berperan dalam meningkatkan kemampuan petani dalam pembangunan pertanian. Hal lain yang juga penting adalah mengembangkan kemitraan petani atau kelompok tani dengan pihak swasta atau perusahaan yang berkaitan langsung dengan komoditas cabai.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurachman, A., A. Dariah, dan A. Mulyani. 2008. Strategi dan teknologi pengelolaan lahan kering mendukung pengadaan pangan nasional. *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pertanian* 27(2): 43-49.
- Adiyoga, W., R. Suherman, N. Gunadi, dan A. Hidayat. 2004. Aspek nonteknis dan indikator efisiensi sistem pertanaman tumpang sari sayuran dataran tinggi. *Jurnal Hortikultura* 14(3): 217-227.
- Arsyad, S. 2006. *Konservasi Tanah dan Air*. IPB Press, Bogor.
- Asha, P., B. Leimona, dan Suyanto. 2006. *Kontrak Konservasi Tanah dan Air*; Skema
- Imbal Jasa Lingkungan melalui Lelang Konservasi. *Rupes Sumberjaya Brief No. 5*. ICRAF, Bogor.
- Asriani, P.S. 2003. Konsep agribisnis dan pembangunan pertanian berkelanjutan. *Jurnal Agrisep* 1(2): 144-150.

- Bachri, S., Sukido, dan N. Ratman. 1993. Peta Geologi Lembar Tilamuta, Sulawesi Skala 1 : 250.000. Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi, Bandung.
- Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) Kabupaten Boalemo. 2009. Profil Pembangunan Kabupaten Boalemo Tahun 2008. Bappeda Kabupaten Boalemo, Tilamuta.
- BPS (Badan Pusat Statistik) Kabupaten Boalemo. 2009. Kabupaten Boalemo dalam Angka Tahun 2008. BPS Kabupaten Boalemo, Tilamuta.
- BPS (Badan Pusat Statistik) Provinsi Gorontalo. 2009. Provinsi Gorontalo dalam Angka Tahun 2008. BPS Provinsi Gorontalo, Gorontalo.
- BPS (Badan Pusat Statistik) RI. 2008. Statistik Indonesia tahun 2008. BPS, Jakarta.
- BPTP (Balai Pengkajian Teknologi Pertanian) Gorontalo. 2002. Pemilihan Farming System Zone Penelitian, Pengkajian dan Diseminasi Teknologi Pertanian di BPTP Gorontalo. BPTP Gorontalo.
- Baruwadi, M., R. Yusuf, S. Canon, dan F. Zakaria. 2007. *Road Map* Pengembangan Komoditas Pertanian di Kabupaten Boalemo. Kerja Sama Lembaga Penelitian Universitas Negeri Gorontalo dengan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo, Gorontalo.
- Dariah, A., U. Haryati, dan T. Budhyastoro. 2004. Teknologi konservasi mekanik. hlm. 109–132. *Dalam* Konservasi Tanah pada Lahan Kering Berlereng. Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanah dan Agroklimat, Bogor.
- Deptan. 2009. Basis data statistik pertanian 2000–2009. Pusat data dan Informasi Pertanian, Departemen Pertanian (Deptan) RI, Jakarta.
- Dinas PU Provinsi Gorontalo. 2009. Data Iklim Wilayah Kabupaten Boalemo Periode Tahun 1998–2008. Dinas PU Provinsi Gorontalo, Gorontalo.
- Direktorat Jenderal Hortikultura. 2008. Membangun Hortikultura Berdasarkan Enam Pilar Pengembangan. Direktorat Jenderal Hortikultura, Jakarta.
- Djaenudin, D., M. Hendrisman, H. Subagyo, A. Mulyani, dan N. Suharta. 2000. Kriteria Kesesuaian Lahan untuk Komoditas Pertanian. Ver. 3. Pusat Penelitian Tanah dan Agroklimat, Bogor.
- Djaenudin, D., H. Marwan, H. Subagyo, dan A. Hidayat. 2003. Petunjuk Teknis Evaluasi Lahan untuk Komoditas Pertanian. Balai Penelitian Tanah, Bogor.
- Douglas, M. 1992. Policy and institutional considerations in development of conservation farming systems. p. 101–122. *In* S. Arsyad, I. Amin, T. Sheng, dan W. Moldenhauer (Eds). *Conservation Policies for Hillslope Farming*. Soil and Water Conservation Society, Ankey, Iowa.
- FAO. 1976. A framework for Land Evaluation. FAO Soil Bulletin No. 32, Rome.
- Fauziah, U. 2010. Harga cabai tetap fluktuatif. *Majalah Trubus*, Edisi 482 Januari 2010/ XLI.
- Hikmatullah, N. Suharta, dan A. Hidayat. 2008. Potensi sumber daya lahan untuk pengembangan komoditas pertanian di Provinsi Kalimantan Timur. *Jurnal Sumberdaya Lahan* 2(1): 45–58.
- Husain, J., H.H. Gerke, and R.F. Hüttl. 2002. Infiltration measurements for determining effects of land use change on soil hydraulic properties in Indonesia. *In* M. Pagliai and R. Jones (Eds). *Sustainable Land Management for Environmental Protection - Soil Physics Approach*. *Adv. Geocol.* 32: 230–236.
- Husain, J., J.N. Luntungan, Y. Kamagi, dan Nurdin. 2005. Model Usaha Tani Jagung Berbasis Konservasi di Provinsi Gorontalo. Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Provinsi Gorontalo, Gorontalo.
- Imran, S. 2008. Analisis faktor-faktor produksi usaha tani cabai rawit di Provinsi Gorontalo. *Jurnal Ilmiah Agropolitan* 1(2): 85–93.
- Jamal, E., Syahyuti, dan A.M. Hurun. 2002. Reformasi agraria dan masa depan pertanian. *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pertanian* 21(4): 133–139.
- Jayadinata, J.T. 1999. Tata Guna Tanah dalam Perencanaan Perdesaan, Perkotaan dan Wilayah. Penerbit ITB, Bandung.
- Joseph, B.Th. 2005. Sumber Daya Tanah dan Pelestarian Lingkungan Hidupnya. Jurusan Tanah Fakultas Pertanian Universitas Sam Ratulangi, Manado.
- Lorenz, G., C.L., Bonelli, S. Roldan, C. Araya, and K. Rondano. 2000. Soil Quality Change due to Land Use in a Kastanozem-Phaeozem Soilscape of Semiarid Chaco. *Mitteilungen der Deutschen Bodenkundlichen Gesellschaft*. Band 93.
- Mario, M.Dg. 2009. Cabai “Malita FM” varietas unggul Gorontalo. Makalah disampaikan pada Temu Teknis Pengembangan Komoditi Unggulan Boalemo, Tilamuta, 11 Maret 2009. Balai Pusat Informasi Jagung Provinsi Gorontalo, Gorontalo.
- Mulyani, A. dan I. Las. 2008. Potensi sumber daya lahan dan optimalisasi pengembangan komoditas penghasil bioenergi di Indonesia. *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pertanian* 27(1): 31–41.
- Nasoetion, L.I. 1999. Tinjauan ekonomi politik transformasi agraria. Makalah pada Seminar di LP3ES, Jakarta, 28 Oktober 1999.
- Niode, A.S. 2007. Gorontalo; Perubahan Nilai-nilai dan Pranata Sosial. PT Pustaka Indonesia Press, Jakarta.
- Noorhadi dan Sudadi. 2003. Kajian pemberian air dan mulsa terhadap iklim mikro pada tanaman cabai di tanah Entisol. *Jurnal Ilmu Tanah dan Lingkungan* 4(1): 41–49.
- Nurdin, D.A. Rachim, Darmawan, Suwarno, M. Baruwadi, R. Yusuf, F. Zakaria, dan J. Pakaja. 2009. Pengembangan Komoditas Unggulan Pertanian Berdasarkan Karakteristik Potensi Sumber Daya Lahan dan Keunggulan Wilayah untuk Pertanian di Kabupaten Boalemo. Kerja Sama Bappeda Kabupaten Boalemo dengan Pusat Kajian Pertanian Tropis Universitas Negeri Gorontalo, Tilamuta.
- Nuryanto, A., D. Setyawati, I. Lidiawati, J. Suyana, L. Karlinasari, M.A. Nasri, N. Puspaningsih, dan S.B. Yuwono. 2003. Strategi pengelolaan DAS dalam rangka optimalisasi kelestarian sumber daya air; Studi kasus DAS Ciliwung hulu. Makalah Pengantar Filsafat Sains Sekolah Pascasarjana IPB, Bogor.
- Oldeman, L.R. and S. Darmiyati. 1977. The agroclimatic map of Sulawesi, scale 1: 2,500,000. *Contr. Centre. Res. Inst. Agric. Bull.* No. 60.
- Osembebo. 1987. Alley farming. *Agric. Syst.* 24: 31–51.
- Pomalingo, N. and J. Husain. 2003. Impact of land use change on soil hydraulic properties and its spatial variability. hlm. 250–256. *Dalam* Prosiding Kongres Nasional VIII Himpunan Ilmu Tanah Indonesia (HITI), Padang, 21–23 Juli 2003.
- Pranadji, T. 2008. Membedah Gorontalo sebagai calon bintang timur pertanian Indonesia di Abad 21. *Jurnal Analisis Kebijakan Pertanian* 6(3): 222–238.
- Rachman, A. 1993. Sistem pertanaman lorong (*alley cropping*). hlm. 18–24. Informasi Penelitian Tanah, Air, Pupuk, dan Lahan. Pusat Penelitian Tanah dan Agroklimat, Bogor.
- Rachman, H. 2003. Dasar penetapan komoditas unggulan nasional di tingkat provinsi. Makalah Lokakarya Sinkronisasi Program Penelitian dan Pengkajian Teknologi Pertanian. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian, Bogor.
- Rachman, A., A. Dariah, dan E. Husen. 2004. Olah tanah konservasi. hlm. 189–210. *Dalam* Teknologi Konservasi Tanah pada Lahan Kering Berlereng. Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanah dan Agroklimat, Bogor.
- Rangkuti, P.A. 2009. Strategi komunikasi membangun kemandirian pangan. *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pertanian* 28(2): 39–45.
- Rukmana, R. 2006. Usaha Tani Cabai Rawit. Cetakan ke-5. Kanisius, Yogyakarta.
- Sajogyo. 2002. Pertanian dan kemiskinan. *Jurnal Ekonomi Rakyat* 1(1): 1–15.
- Sanim, B. 2006. Analisis ekonomi lingkungan dan audit lingkungan. Makalah disampaikan pada Pelatihan Dosen Perguruan Tinggi Negeri Se-Jawa dan Bali dalam Bidang Audit Lingkungan, Bogor, 11–20 September 2006.

- Santoso, D., J. Purnomo, I.G.P. Wigena, dan E. Tuherkih. 2004. Teknologi konservasi vegetatif. Olah tanah konservasi. hlm. 77-108. *Dalam* Konservasi Tanah pada Lahan Kering Berlereng. Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanah dan Agroklimat, Bogor.
- Saptana dan Ashari. 2007. Pembangunan pertanian berkelanjutan melalui kemitraan usaha. *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pertanian* 26(4): 123-130.
- Saptana, E.L. Hastuti, K.S. Indraningsih, Ashari, S. Friyatno, Sunarsih, dan V. Darwis. 2005. Pengembangan Model Kelembagaan Kemitraan Usaha yang Berdaya Saing di Kawasan Sentra Produksi Hortikultura. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian, Bogor.
- Saragih, B. 1997. Pembangunan Sektor Agribisnis dalam Kerangka Pembangunan Ekonomi Indonesia. Bappenas, Jakarta.
- Saragih, B. 1998. Agribisnis; Paradigma Baru Pembangunan Ekonomi Berbasis Pertanian. CV Nasional, Jakarta.
- Saragih, B. 2002. Sistem dan Usaha Agribisnis. Institut Pertanian Bogor, Bogor.
- Satyarini, B.T. 2009. Analisis kelayakan usaha tani cabai di lahan pantai (Studi kasus di pantai Pandan Simo Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta). *Prosiding Seminar Nasional Peningkatan Daya Saing Agribisnis Berorientasi Kesejahteraan Petani*, Bogor, 14 Oktober 2009. Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Bogor.
- Setiadi. 2001. Bertanam Cabai. Penebar Swadaya, Jakarta.
- Simatupang, P., I.W. Rusastra, H.P. Saliem, Supriyati, dan Saptana. 2003. Prospek Diversifikasi Usaha Tani di Lahan Sawah: Kasus empat kabupaten di Jawa. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian, Bogor dan Bappenas/USAID/DAI, Jakarta.
- Soekartawi. 1995. Analisis Usaha Tani. Universitas Indonesia Press, Jakarta.
- Soil Survey Staff. 2006. Keys to Soil Taxonomy. Tenth Edition. US Dept. Agric., Natural Resources Conservation Service, Washington DC.
- Sudaryanto, T. dan I.W. Rusastra. 2006. Kebijakan strategis usaha pertanian dalam rangka peningkatan produksi dan pengentasan kemiskinan. *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pertanian* 25(4): 115-122.
- Suripin. 2000. Pelestarian Sumber Daya Tanah dan Air. Andi, Yogyakarta.
- Susanto, A.N. dan M.A. Sirappa. 2007. Karakteristik dan ketersediaan data sumber daya lahan pulau-pulau kecil untuk perencanaan pembangunan pertanian. *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pertanian* 26(2): 41-53.
- Suwandi. 1995. Strategi pola kemitraan dalam menunjang agribisnis bidang peternakan. Industrialisasi usaha ternak rakyat dalam menghadapi tantangan globalisasi. *Prosiding Simposium Nasional Kemitraan Usaha Ternak*. Ikatan Sarjana Ilmu-ilmu Peternakan Indonesia (ISPI) bekerja sama dengan Balai Penelitian Ternak, Bogor.
- Syafruddin, A.N. Kairupan, A. Negara, dan J. Limbongan. 2004. Penataan sistem pertanian dan penetapan komoditas unggulan berdasarkan zona agroekologi di Sulawesi Tengah. *Jurnal Sumberdaya Lahan* 23(2): 61-67.
- Syahyuti. 2006. 30 Konsep Penting dalam Pembangunan Pedesaan, Penjelasan tentang Konsep, Istilah, Teori dan Indikator serta Variabel. PT Bina Rena Pariwisata, Jakarta.
- Tanindo Agribusiness Company. 2009. Menyimak Geliat Bisnis Cabai Indonesia. <http://www.tanindo.com>. 2009. [22 Oktober 2009].
- Tim Fahutan IPB. 2008. Kajian Pemantapan Kawasan Hutan di Kabupaten Boalemo. Kerja Sama Bappeda Kabupaten Boalemo dengan Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor.
- White, B. 1990. Agroindustri, Industrialisasi Pedesaan dan Transformasi Pedesaan. Kerja Sama antara Pusat Studi Pembangunan Lembaga Penelitian Institut Pertanian Bogor dan Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia, Jakarta.
- Zulkifli, A.K., A. Yusuf, A. Azis, T. Iskandar, dan M.N. Alidan. 2008. Rakitan Teknologi Budi Daya Cabai. BPTP Nanggroe Aceh Darussalam, Banda Aceh.